

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA**

51

Perspektif:	Stakeholders Perspective
Sasaran Strategis:	Nilai manfaat diplomasi ekonomi KJRI Frankfurt yang optimal
Deskripsi Sasaran Strategis:	<p>Latar belakang: Sesuai dengan tujuan keberadaan organisasi Perwakilan RI serta amanat kinerja dari Presiden RI, capaian kinerja diplomasi ekonomi perlu diukur relevansinya dengan capaian di bidang perdagangan, investasi, dan wisatawan mancanegara. Hal ini ditujukan agar hasil diplomasi dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat luas di tanah air. Nilai manfaat diplomasi ekonomi yang optimal merupakan jumlah nominal manfaat secara ekonomi, keuangan, dan pembangunan yang paling menguntungkan yang dihasilkan oleh berbagai kerja sama dan hubungan perdagangan, investasi, dan pariwisata antara negara.</p>
Indikator Kinerja Utama:	IKU-1 Persentase Peningkatan Nilai Perdagangan Indonesia dengan Wilayah Kerja KJRI Frankfurt
Deskripsi Indikator Kinerja Utama:	<p>Definisi: Persentase Peningkatan: kenaikan nilai perdagangan dari tahun sebelumnya sesuai target yang ditetapkan oleh Kementerian Luar Negeri. Wilayah Kerja adalah tempat kedudukan Perwakilan RI beserta wilayah kerja rangkapan dan organisasi internasional yang dimandatkan secara resmi untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah RI. Nilai Perdagangan: Nilai ekspor Indonesia ditambah dengan nilai impor (Barang dan jasa) Indonesia yang diperoleh dari Kemendag atau BPS. Data diperoleh dari Januari - Oktober tahun berjalan.</p> <p>Formula:</p> $\frac{(\text{Data Nilai Perdagangan Indonesia dengan wilayah kerja Periode saat ini} - \text{Data Nilai Perdagangan Indonesia dengan wilayah kerja Periode tahun sebelumnya})}{\text{Data Nilai Perdagangan Indonesia dengan wilayah kerja Periode tahun sebelumnya}} \times 100\%$ <p><i>Jika Perwakilan RI melingkupi beberapa negara maka dirata-ratakan</i></p> <p>Tujuan: Sesuai dengan visi misi Presiden yang mengedepankan diplomasi ekonomi, Kemenlu bertekad untuk meningkatkan peran Perwakilan RI guna memberikan kontribusi lebih intensif kepada upaya peningkatan nilai perdagangan Indonesia dengan negara akreditasi melalui berbagai macam kegiatan promosi dagang, dll.</p>
Saluan Pengukuran :	Persentase
Tingkat Kendali IKU :	<input type="checkbox"/> High <input type="checkbox"/> Moderate <input checked="" type="checkbox"/> Low
Tingkat Validitas IKU :	<input checked="" type="checkbox"/> Exact <input type="checkbox"/> Proxy <input type="checkbox"/> Activity
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU :	Fungsi Ekonomi
Unit/Pihak Penyedia Data :	Fungsi Ekonomi
Sumber Data :	Diutamakan data dari lembaga statistik resmi di wilayah kerja (jika data utama tidak ada, maka dapat menggunakan data perdagangan antar negara yang dikeluarkan oleh Kemendag atau BPS Indonesia dengan dikonversi dalam mata uang USD).
Jenis Cascading IKU:	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta <input type="checkbox"/> Cascading Non peta <input type="checkbox"/> Non-Cascading
Metode Cascading :	<input type="checkbox"/> Direct <input checked="" type="checkbox"/> Indirect
Jenis Konsolidasi Periode :	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Take Last Known Value
Jenis Konsolidasi Lokasi :	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Raw data
Polarisasi Indikator Kinerja :	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan :	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2019		2020		2021
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	2%	7,51%	2%	1,69%	2%

Indikator Kinerja Utama:

IKU-2 Persentase Peningkatan Nilai Investasi Asing ke Indonesia dari Negara Akreditasi KJRI Frankfurt

Deskripsi Indikator Kinerja Utama:

Definisi:
Persentase Peningkatan: persentase peningkatan dari tahun sebelumnya sesuai target yang ditetapkan oleh Kementerian Luar Negeri.
Wilayah Kerja adalah tempat kedudukan Perwakilan RI beserta wilayah kerja rangkaian dan organisasi internasional yang dimandatkan secara resmi untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah RI.
Nilai Investasi Asing: Nilai Penanaman Modal Asing (PMA) ke Indonesia dalam kurun waktu satu tahun yang diperoleh dari data BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Data diperoleh dari Januari - September tahun berjalan.

Formula:

$$\frac{(\text{Data Nilai investasi Asing ke Indonesia dari wilayah kerja Periode saat ini} - \text{Data Nilai investasi Asing ke Indonesia dari wilayah kerja Periode tahun sebelumnya})}{\text{Data Nilai investasi Asing ke Indonesia dari Wilayah Kerja KJRI Frankfurt Periode tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Jika Perwakilan RI melingkupi beberapa negara maka dirata ratakan

Tujuan:
 Sesuai dengan visi misi Presiden yang mengedepankan diplomasi ekonomi, Kemenlu berkecak untuk meningkatkan peran Perwakilan RI guna memberikan kontribusi lebih intensif kepada upaya peningkatan nilai investasi asing ke Indonesia

Satuan Pengukuran :

Persentase

Tingkat Kendali IKU :

High Moderate Low

Tingkat Validitas IKU :

Exact Proxy Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU :

Fungsi Ekonomi

Unit/Pihak Penyedia Data :

Fungsi Ekonomi

Sumber Data :

Diutamakan Data Publikasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan instansi/lembaga terkait dengan penanaman modal di negara akreditasi (jika data utama tidak ada, maka dapat menggunakan data dari lembaga statistik resmi di negara akreditasi/wilayah kerja dengan dikonversi dalam mata uang USD).

Jenis Cascading IKU:

Cascading Peta Cascading Non peta Non-Cascading

Metode Cascading :

Direct Indirect

Jenis Konsolidasi Periode :

Sum Average Take Last Known Value

Jenis Konsolidasi Lokasi :

Sum Average Raw data

Polarisasi Indikator Kinerja :

Maximize Minimize Stabilize

Periode Pelaporan :

Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2019		2020		2021
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	2%	(-2,9)%	2%	1,52%	2%

Indikator Kinerja Utama: IKU-3 Persentase Peningkatan Jumlah Wisatawan Mancanegara ke Indonesia dari Negara Akreditasi KJRI Frankfurt

Deskripsi Indikator Kinerja Utama:

Definisi:
Persentase Peningkatan: penambahan jumlah dari tahun sebelumnya sesuai target yang ditetapkan oleh Kementerian Luar Negeri.
Wilayah Kerja adalah tempat kedudukan Perwakilan RI beserta wilayah kerja rangkaian dan organisasi internasional yang dimandatkan secara resmi untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah RI.
Jumlah Wisatawan Mancanegara ke Indonesia: Jumlah total Warga dari negara asing yang mengadakan perjalanan wisata ke Indonesia.
 Data didapatkan melalui Badan Pusat Statistik atau Kementerian Pariwisata. Data diperoleh dari Januari - Oktober tahun berjalan.

Formula:

$$\frac{(\text{Data wisatawan mancanegara dari wilayah kerja Periode saat ini} - \text{Data wisatawan mancanegara dari wilayah kerja Periode yang lalu})}{\text{Data wisatawan mancanegara dari wilayah kerja Periode yang lalu}} \times 100\%$$
 Jika Perwakilan RI melingkupi beberapa negara maka dirata-ratakan

Tujuan:
 Sesuai dengan visi misi Presiden yang mengedepankan diplomasi ekonomi, Kemenlu bertekad untuk meningkatkan peran Perwakilan RI guna memberikan kontribusi lebih intensif kepada upaya peningkatan nilai wisatawan asing ke Indonesia melalui berbagai macam kegiatan promosi budaya, pariwisata, kuliner, dll.

Satuan Pengukuran : persentase

Tingkat Kendali IKU : High Moderate Low

Tingkat Validitas IKU : Exact Proxy Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU : Fungsi Ekonomi dan Fungsi Pensosbud

Unit/Pihak Penyedia Data : Fungsi Ekonomi dan Fungsi Pensosbud

Sumber Data : Diutamakan data dari lembaga statistik resmi di wilayah kerja jika data utama tidak ada, maka dapat menggunakan data statistik antar negara yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pariwisata dan/atau Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM dan/atau Pemerintah Daerah).

Jenis Cascading IKU: Cascading Peta Cascading Non peta Non-Cascading

Metode Cascading : Direct Indirect

Jenis Konsolidasi Periode : Sum Average Take Last Known Value

Jenis Konsolidasi Lokasi : Sum Average Raw data

Polarisasi Indikator Kinerja : Maximize Minimize Stabilize

Periode Pelaporan : Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2019		2020		2021
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	5%	0,35%	5%	1,15%	5%

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA**

52

Perspektif: Stakeholders Perspective

Sasaran Strategis: Citra Positif Indonesia yang Meningkat di Wilayah Kerja KJRI Frankfurt

Deskripsi Sasaran Strategis: Citra positif Indonesia adalah persepsi yang dipercaya/diyakini aktor lain terhadap Indonesia yang didasarkan kepada pola perilaku yang ditunjukkan Indonesia dalam pergaulan internasional, pola perilaku tersebut terbangun berdasarkan power yang dimiliki baik yang bersifat hard maupun soft, citra dalam hal ini dapat bersifat positif maupun negatif). Citra juga merupakan salah satu dampak akhir yang terbentuk dari suatu usaha diplomasi ataupun kebijakan luar negeri yang diambil. Citra positif adalah hal yang perlu dibangun oleh Indonesia di mala dunia internasional. Adanya citra positif yang terbentuk akan meningkatkan kepercayaan dunia internasional, sehingga dapat menempatkan posisi Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dalam berbagai aspek kehidupan.

Latar Belakang
Citra merupakan salah satu dampak yang terbentuk dari suatu usaha diplomasi. Adanya citra positif yang terbentuk akan meningkatkan kepercayaan dunia internasional. Faktor-faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap citra meliputi bidang sosial dan budaya dapat dikelola baik oleh Indonesia.

Wilayah Kerja adalah tempat kedudukan Perwakilan RI beserta wilayah kerja rangkaian dan organisasi internasional yang dimandatkan secara resmi untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah RI.

Indikator Kinerja Utama: IKU 1: Indeks Citra Indonesia di Wilayah Kerja KJRI Frankfurt

Deskripsi Indikator Kinerja Utama:

Definisi:
Indeks Citra: Indeks yang mengukur kesan atau pandangan dunia internasional terhadap negara Indonesia di dunia internasional. Indeks Citra Indonesia diperoleh berdasarkan survei yang mengukur 3 dimensi, yaitu TOURISM & SOCIO-CULTURE, ECONOMY, dan GOVERNANCE AND RULE OF LAW melalui kuesioner secara luring atau daring yang dapat diakses pada tautan <https://citraindonesia.kemlu.go.id>, yang disebarkan oleh seluruh Perwakilan RI di Luar Negeri kecuali Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) dengan responden Warga Negara Asing di wilayah akreditasi.

Formula:
Indeks citra positif Indonesia diukur dengan menggunakan kuesioner dengan skala 0 s/d 5

Interval	Kategori Indeks	Skala Indeks
0 - 16,87	Sangat Buruk	0
16,88 - 35,35	Buruk	1
35,36 - 50,01	Cukup Buruk	2
50,02 - 66,66	Cukup Baik	3
66,69 - 83,35	Baik	4
83,36 - 100	Sangat Baik	5

Tujuan:
Untuk mengukur sampai sejauh mana citra positif Indonesia di wilayah kerja KJRI Frankfurt

Satuan Pengukuran : Indeks Citra Indonesia

Tingkat Kendali IKU : () High () Moderate (X) Low

Tingkat Validitas IKU : (X) Exact () Proxy () Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU : Fungsi Pensosbud

Unit/Pihak Penyedia Data : Fungsi Pensosbud

Sumber Data : Hasil olah data kuesioner indeks citra Indonesia, dengan menggunakan database website melalui tautan <https://citraindonesia.kemlu.go.id>

Jenis Cascading IKU: (X) Cascading Peta () Cascading Non peta () Non-Cascading

Metode Cascading : () Direct (X) Indirect

Jenis Konsolidasi Periode : () Sum () Average (X) Take Last Known Value

Jenis Konsolidasi Lokasi : () Sum () Average (X) Raw data

Polarisasi Indikator Kinerja : (X) Maximize () Minimize () Stabilize

Periode Pelaporan : () Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2019		2020		2021
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	4 (skala 5)	4,01 (skala 5)	3,8 (skala 5)	3,4 (skala 5)	3,8 (Skala 5)
s.d TRIWULAN I	---	---	---	---	---
s.d TRIWULAN II	---	---	---	---	---
s.d TRIWULAN III	4 skala 5	4,01 skala 5	3,8 skala 5	3,4 (skala 5)	---
s.d TRIWULAN IV	4 skala 5	4,01 skala 5	3,8 skala 5	3,4 (skala 5)	3,8 (Skala 5)

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA**

c1

Persepektif:	<i>Customer Perspective</i>
Sasaran Strategis:	Peindungan WNI/BHI dan Pelayanan Publik KJRI Frankfurt yang Prima
Deskripsi Sasaran Strategis:	<p>Pelindungan adalah segala upaya yang dilakukan untuk melayani dan melindungi kepentingan WNI dan BHI di luar negeri termasuk penyediaan bantuan informasi hukum dan/ atau sosial dengan memperhatikan prinsip mengedepankan keterlibatan pihak yang bertanggung jawab dan/atau berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tidak mengambil alih tanggung jawab pidana dan/atau perdata WNI, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, hukum negara setempat serta hukum dan kebiasaan internasional.</p> <p>Sumber: Permenlu No 5 Tahun 2018 tentang Pelindungan WNI di luar negeri</p> <p>WNI adalah adalah warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia</p> <p>Ruang lingkup WNI dalam hal ini adalah yang berkedudukan di luar negeri</p> <p>Pelayanan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara Indonesia atau warga negara asing atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Perwakilan RI.</p> <p>Sumber: UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>Prima adalah sangat baik, utama.</p> <p>Latar Belakang:</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bagi WNI yang berkedudukan di luar negeri, pelindungan dan pelayanan merupakan bagian dari pelayanan publik yang wajib diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dan dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri. Sesuai Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, pemberian pelindungan WNI di luar negeri dan pelayanan publik dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, hukum dan kebiasaan internasional.</p> <p>Pembinaan pelayanan publik oleh aparat pemerintah kepada masyarakat merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat sehingga kedudukan aparat pemerintah dalam pelayanan umum (public services) sangat strategis karena akan menentukan sejauhmana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat dan sejauh mana negara telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya. Perkembangan kehidupan masyarakat yang sangat dinamis seiring dengan tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik, merupakan indikasi dari empowering yang dialami oleh masyarakat. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan.</p>
Indikator Kinerja Utama:	IKU-1 Persentase kasus WNI di luar negeri yang diselesaikan
Deskripsi Indikator Kinerja Utama:	<p>Definisi:</p> <p>IKU 1: Persentase Kasus WNI di Luar Negeri yang Diselesaikan mengukur tingkat capaian penyelesaian kasus/permasalahan yang melibatkan atau dialami WNI.</p> <p>Penyelesaian kasus WNI di luar negeri yang tepat dan terukur adalah segala upaya penanganan kasus-kasus WNI di luar negeri yang cepat dan komprehensif sesuai peraturan perundang-undangan nasional, hukum dan kebiasaan internasional dan tercatat dalam Portal Peduli WNI.</p> <p>Kasus WNI di luar negeri adalah kasus-kasus yang menimpa WNI di luar negeri dan memerlukan penanganan Perwakilan RI menurut hukum nasional, hukum negara setempat, hukum dan kebiasaan internasional. Berdasarkan tingkat komplikasinya, kasus dibagi ke dalam dua kategori yaitu Kasus Umum dan Kasus Khusus.</p> <p>Kasus Khusus (KK) mencakup namun tidak terbatas pada Kasus WNI di Luar Negeri yang bersifat high profile case (seperti kasus hukuman mati, pelaku atau korban pembunuhan, korban penyiksaan fisik berat, korban TPPO atau terindikasi korban TPPO, kasus narkoba), kasus yang melibatkan WNI anak (di bawah umur); evaluasi WNI akibat bencana alam atau bencana buatan manusia; dan kasus yang bersifat insidental dan/atau masif yang memiliki dampak politis, sosial, ketertiban masyarakat, dan keselamatan jiwa WNI.</p> <p>Kasus Umum (KU) merupakan kasus di luar Kasus Khusus yang mencakup namun tidak terbatas pada kasus hukum perdata, pidana, ketenagakerjaan, keimigrasian, dan administratif.</p> <p>Kasus Khusus yang Selesai (KKS) atau Kasus Umum yang Selesai (KUS) adalah kasus yang telah ditangani sesuai dengan ketentuan hukum nasional; hukum negara setempat; dan/atau hukum dan kebiasaan internasional yang berlaku terkait pemenuhan hak-hak WNI di luar negeri.</p> <p>Kasus yang Ditangani (KT) adalah total kasus yang dihadapi oleh WNI di luar negeri yang belum selesai maupun sudah selesai, berdasarkan pengaduan, laporan, pemberitaan, atau informasi yang diterima dari berbagai pihak, yang termasuk dalam lingkup pelayanan dan Pelindungan</p> <p>Penghitungan jumlah kasus didasarkan pada jumlah kasus/persoalan/masalah yang dihadapi oleh seorang WNI. Seorang WNI dapat menghadapi beberapa kasus yang berbeda secara bersamaan. Contohnya: Pekerja Migran Indonesia mengadakan persoalan mengalami kekerasan fisik oleh Pemberi Kerja dan ternyata hak gajinya tidak penuh serta telah melampaui izin tinggalnya. Dalam hal ini, WNI dimaksud memiliki 3 kasus yang berbeda, yaitu: kasus pidana (korban kekerasan), kasus ketenagakerjaan (gaji) dan kasus keimigrasian. Perbedaan kasus diperlukan mengingat penanganan kasus-kasus tersebut didasarkan oleh prosedur/SOP, peraturan nasional, setempat dan internasional yang berbeda. Penanganan ketiga kasus juga mengharuskan Perwakilan untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berbeda, seperti: pihak kepoisian, kementerian luar negeri/imigrasi, kementerian ketenagakerjaan negara setempat dan dengan target penyelesaian yang berbeda juga.</p> <p>Kasus yang ditangani pada tahun berjalan adalah sisa kasus dari tahun sebelumnya. Apabila ada kasus yang tidak selesai pada tahun berjalan, kasus yang tidak selesai tersebut akan dihitung pada tahun berikutnya.</p> <p>IKU Persentase penyelesaian kasus WNI dan BHI di luar negeri di luar negeri, terdiri dari 2 unsur, yaitu:</p> <p>Unsur 1: Persentase Kasus Khusus yang diselesaikan. Bobot: 55%</p> <p>Unsur 2: Persentase Kasus Umum yang diselesaikan. Bobot: 45%</p> <p>Komponen 1 dibobotkan lebih tinggi karena tingkat urgensi, kompleksitas, dan sumber daya dalam penanganan dalam penyelesaian kasus khusus lebih tinggi dibanding kasus umum.</p> <p><i>*Perwakilan dapat menghapus Kasus Khusus apabila tidak terdapat Kasus Khusus di Negara Akreditasinya.</i></p>

Formula:		
(0.55 X Persentase Kasus Khusus yang diselesaikan) + (0.45 X Persentase Kasus Umum yang diselesaikan)		
Tujuan:		
Mengukur tingkat capaian penyelesaian kasus-kasus WNI di luar negeri		
Setuan Pengukuran :	Indeks	
Tingkat Kendali IKU :	<input type="checkbox"/> High <input checked="" type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> Low	
Tingkat Validitas IKU :	<input checked="" type="checkbox"/> Exact <input type="checkbox"/> Proxy <input type="checkbox"/> Activity	
Uni/Pihak Penanggung Jawab IKU :	Fungsi Konsuler Perwakilan RI dan Atase Imigrasi	
Uni/Pihak Penyedia Data :	Fungsi Konsuler Perwakilan RI	
Sumber Data :	Laporan penanganan kasus, database Portal Peduli WNI, dan Berita Acara Serah Terima Penanganan Kasus	
Jenis Cascading IKU:	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta <input type="checkbox"/> Cascading Non peta <input type="checkbox"/> Non-Cascading	
Metode Cascading :	<input type="checkbox"/> Direct <input checked="" type="checkbox"/> Indirect	
Jenis Konsolidasi Periode :	<input type="checkbox"/> Sum <input checked="" type="checkbox"/> Average <input type="checkbox"/> Take Last Known Value	
Jenis Konsolidasi Lokasi :	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja :	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize	
Periode Pelaporan :	<input type="checkbox"/> Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan	

Periode Pelaporan	2019		2020		2021
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	70%	100%	73%	100%	78%
s.d TRIWULAN I	20%	25%	23%	20%	28%
s.d TRIWULAN II	40%	50%	43%	40%	48%
s.d TRIWULAN III	60%	75%	63%	80%	68%
s.d TRIWULAN IV	70%	100%	73%	100%	78%

Indikator Kinerja Utama:	IKU-2 Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran KJRI Frankfurt																									
Deskripsi Indikator Kinerja Utama:	<p>Definisi:</p> <p>Kepuasan pelayanan adalah kondisi dimana pelayanan yang diterima sesuai dan/atau lebih baik daripada yang diharapkan oleh penerima jasa. Pelayanan Kekonsuleran adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan Perwakilan RI dalam memberikan pelayanan kepada publik sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh hukum nasional dengan memperhatikan hukum negara setempat serta kebiasaan dan hukum internasional yang mencakup, namun tdk terbatas pada layanan kependudukan, notariat, kehakiman, keimigrasian, dan ketenagakerjaan. Sumber: UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>Kepuasan pelayanan kekonsuleran diukur dari nilai persepsi masyarakat dan pemangku kepentingan atas layanan terkait perlindungan WNI di luar negeri yang diterima.</p> <p>Ruang Lingkup:</p> <p>Responden: setiap orang/pihak yang menerima pelayanan jasa kekonsuleran. Hasil penilaian kuesioner/survey yang diambil merupakan akumulasi survey hingga periode berjalan, contoh: hasil penilaian survey pada triwulan III merupakan akumulasi penilaian survey triwulan I, II dan III</p> <p>Untuk memperoleh nilai persepsi, Perwakilan RI melakukan survei dengan pemberian kuesioner (manual dan/atau elektronik) kepada responden mengenai pelayanan kekonsuleran seperti: pelayanan legalisasi, perpanjangan passpor, penerbitan surat keterangan dan pelayanan kekonsuleran lainnya yang diselenggarakan oleh Perwakilan RI di luar negeri. Data survei kemudian dihitung menggunakan skala likert untuk menghasilkan Nilai Interval Indeks dalam rentang 1,00 - 4,00 atau Nilai Interval Konversi dengan rentang 25 -100%, sesuai Bab V Langkah-Langkah Pengolahan Data Permenpan RB No 14 tahun 2017. Hasil indeks atau persentase kuesioner tersebut menjadi dasar untuk menentukan nilai persepsi kepuasan pelayanan perlindungan WNI di luar negeri, sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai persepsi</th> <th>Nilai Interval Indeks</th> <th>Nilai Interval Konversi (NIK)</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 - 2,5996</td> <td>25,00 - 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,60 - 3,064</td> <td>65,00 - 76,6</td> <td>C</td> <td>Kurang baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,0644 - 3,532</td> <td>76,61 - 88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,5324 - 4,00</td> <td>88,31 - 100</td> <td>A</td> <td>Sangat baik</td> </tr> </tbody> </table> <p>Contoh: apabila hasil kuesioner adalah indeks 3,78 yang masuk dalam rentang Nilai Interval Indeks 3,5324 - 4,00, maka indeks tersebut dapat dikonversi menjadi Nilai Persepsi kepuasan 4.</p> <p>Sumber: PermenPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p>	Nilai persepsi	Nilai Interval Indeks	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik	2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,6	C	Kurang baik	3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik	4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100	A	Sangat baik
Nilai persepsi	Nilai Interval Indeks	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																						
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik																						
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,6	C	Kurang baik																						
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik																						
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100	A	Sangat baik																						

Formula:
 Hasil Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran Dikonversi Menjadi Nilai Persepsi

Tujuan:
 untuk mengetahui kualitas pelayanan kekonsuleran di Perwakilan KJRI Frankfurt

Satuan Pengukuran : Nilai

Tingkat Kendali IKU : () High (X) Moderate () Low

Tingkat Validitas IKU : (X) Exact () Proxy () Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU : Fungsi Konsuler Perwakilan RI, Atase Imigrasi, Atase Ketenagakerjaan dan Atase Perhubungan

Unit/Pihak Penyedia Data : Fungsi Konsuler Perwakilan RI

Sumber Data : Hasil survey/olah kuesioner kepuasan pelayanan kekonsuleran perwakilan

Jenis Cascading IKU: (X) Cascading Peta () Cascading Non peta () Non-Cascading

Metode Cascading : () Direct (X) Indirect

Jenis Konsolidasi Periode : () Sum (X) Average () Take Last Known Value

Jenis Konsolidasi Lokasi : () Sum () Average (X) Raw data

Polarisasi Indikator Kinerja : (X) Maximize () Minimize () Stabilize

Periode Pelaporan : () Bulanan (X) Triwulanan () Semesteran () Tahunan

Periode Pelaporan	2019		2020		2021
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	4 (Skala 4)	3,6 (Skala 4)	4 (Skala 4)	3,7 (Skala 4)	4 (Skala 4)
s.d TRIWULAN I	3 (Skala 4)	2,8 (Skala 4)	3 (Skala 4)	2,9 (Skala 4)	3 (Skala 4)
s.d TRIWULAN II	3 (Skala 4)	2,9 (Skala 4)	3 (Skala 4)	3,1 (Skala 4)	3 (Skala 4)
s.d TRIWULAN III	4 (Skala 4)	3,2 (Skala 4)	4 (Skala 4)	3,5 (Skala 4)	4 (Skala 4)
s.d TRIWULAN IV	4 (Skala 4)	3,6 (Skala 4)	4 (Skala 4)	3,7 (Skala 4)	4 (Skala 4)

Indikator Kinerja Utama: IKU-3 Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Pelindungan WNVBHI KJRI Frankfurt

Definisi:

Kepuasan pelayanan adalah kondisi dimana pelayanan yang diterima sesuai dan/atau lebih baik daripada yang diharapkan oleh penerima jasa.

Pelayanan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara Indonesia atau warga negara asing atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Perwakilan RI.

Sumber: UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Pelindungan adalah segala upaya yang dilakukan untuk melayani dan melindungi kepentingan WNI dan BHI di luar negeri termasuk penyediaan bantuan informasi/hukum dan/atau sosial dengan memperhatikan prinsip yang mengedepankan keterlibatan pihak yang bertanggung jawab dan/atau berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tidak mengambil alih tanggung jawab pidana atau perdata WNI, dan sesuai dengan kelenturan perundang-undangan hukum negara setempat serta hukum atau Kebiasaan Internasional.

Sumber: Permenlu No. 5 Tahun 2018 tentang Pelindungan WNI di Luar Negeri.

WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai WNI. BHI adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan disahkan oleh instansi yang berwajib. WNI dan BHI dalam hal ini adalah yang berkedudukan di luar negeri.

Ruang Lingkup Responden:
 Orang/penerima jasa pelayanan Pelindungan WNI dan BHI.

Hasil penilaian kuesioner/survei yang dihitung pada setiap triwulan merupakan akumulasi survei pada periode berjalan. Contoh: hasil penilaian survei pada triwulan III merupakan akumulasi penilaian survei triwulan I, II dan III.

Untuk memperoleh nilai persepsi, Perwakilan RI melakukan survei dengan pemberian kuesioner (manual dan/atau elektronik) kepada responden mengenai pelayanan pelindungan WNI di luar negeri yang terdiri dari pelayanan penanganan kasus (pemberian bantuan kemanusiaan/sosial/mediasi/litigasi), pelayanan informasi melalui kampanye penyadaran publik, bimbingan teknis, FGD, dsb. Data survei kemudian dihitung menggunakan skala liekert untuk menghasilkan Nilai Interval Indeks dalam rentang 1,00 - 4,00 atau Nilai Interval Konversi dengan rentang 25 - 100%, sesuai Bab V Langkah-Langkah Pengolahan Data Permenpan RB No 14 tahun 2017. Hasil indeks atau persentase kuesioner tersebut menjadi dasar untuk menentukan nilai persepsi kepuasan pelayanan pelindungan WNI di luar negeri, sebagai berikut:

Nilai persepsi	Nilai Interval Indeks	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,6	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100	A	Sangat baik

Contoh: apabila hasil kuesioner adalah indeks 3,78 yang masuk dalam rentang Nilai Interval Indeks 3,5324 - 4,00, maka indeks tersebut dapat dikonversi menjadi Nilai Persepsi kepuasan 4.

Pertanyaan kuesioner dapat merujuk pada 9 (sembilan) unsur SKM yang relevan dengan kegiatan pelayanan, sesuai brafaks dari Pusat.

Sumber: PermenPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Formula:
 Hasil Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan Pelindungan WNI di Luar Negeri Dikonversi Menjadi Nilai Persepsi

Tujuan:

	untuk mengetahui kualitas pelayanan Pelindungan WNI/BHI di Perwakilan KJRI Frankfurt
Satuan Pengukuran :	Nilai
Tingkat Kendali IKU :	<input type="checkbox"/> High <input checked="" type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> Low
Tingkat Validitas IKU :	<input checked="" type="checkbox"/> Exact <input type="checkbox"/> Proxy <input type="checkbox"/> Activity
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU :	Fungsi Konsuler Perwakilan RI, Atase Imigrasi, Atase Ketenagakerjaan dan Atase Perhubungan
Unit/Pihak Penyedia Data :	Fungsi Konsuler Perwakilan RI
Sumber Data :	Hasil survey/olah kuesioner kepuasan pelayanan pelindungan WNI/BHI di perwakilan
Jenis Cascading IKU:	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta <input type="checkbox"/> Cascading Non peta <input type="checkbox"/> Non-Cascading
Metode Cascading :	<input type="checkbox"/> Direct <input checked="" type="checkbox"/> Indirect
Jenis Konsolidasi Periode :	<input type="checkbox"/> Sum <input checked="" type="checkbox"/> Average <input type="checkbox"/> Take Last Known Value
Jenis Konsolidasi Lokasi :	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Raw data
Polarisasi Indikator Kinerja :	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan :	<input type="checkbox"/> Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

Periode Pelaporan	2019		2020		2021
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	4 (Skala 4)	3,6 (skala 4)	4 (Skala 4)	3,7 (skala 4)	4 (Skala 4)
s.d TRIWULAN I	3 (Skala 4)	2,8 (Skala 4)	3 (Skala 4)	2,9 (Skala 4)	3 (Skala 4)
s.d TRIWULAN II	3 (Skala 4)	2,9 (Skala 4)	3 (Skala 4)	3,1 (Skala 4)	3 (Skala 4)
s.d TRIWULAN III	4 (Skala 4)	3,2 (Skala 4)	4 (Skala 4)	3,5 (Skala 4)	4 (Skala 4)
s.d TRIWULAN IV	4 (Skala 4)	3,6 (skala 4)	4 (Skala 4)	3,7 (skala 4)	4 (Skala 4)

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA**

2

Perspektif: *Customer Perspective*

Sasaran Strategis: Dukungan dan Komitmen yang Tinggi atas Kesepakatan di Wilayah Kerja KJRI Frankfurt

Deskripsi Sasaran Strategis: Dukungan adalah sokongan/bantuan.
Komitmen adalah (upaya) perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu.
Tinggi adalah (mendukung) secara penuh.

Kesepakatan Kerja sama adalah konsensus (dalam sebutan apapun) secara tertulis yang memenuhi kaidah dan kesepakatan yang disetujui oleh para pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Para pihak merupakan subjek hukum yang cakap baik dalam aspek hukum Internasional maupun diakui oleh hukum masing-masing negara pihak yang terlibat.

Latar Belakang:
pada wilayah kerja terdapat kesepakatan antara Indonesia dengan pihak di wilayah kerja KJRI/KRI sebagai hasil fasilitasi KJRI/KRI. Kesepakatan tersebut perlu diimplementasikan agar dapat dirasakan kemanfaatannya oleh rakyat Indonesia.

Sub Indikator Kinerja Utama: IKU-1 Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan Indonesia dengan Wilayah Kerja KJRI Frankfurt

Deskripsi Indikator Kinerja Utama:

Definisi:
Tindak lanjut/Implementasi: Tindakan yang diambil untuk langkah-langkah selanjutnya/pelaksanaan, penerapan oleh stakeholder terkait baik di negara Indonesia maupun di negara akreditasi.
Kesepakatan kerja sama: adalah konsensus (dalam sebutan apapun) secara tertulis yang memenuhi kaidah dan kesepakatan yang disetujui oleh para pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Para pihak merupakan subjek hukum yang cakap baik dalam aspek hukum Internasional maupun diakui oleh hukum masing-masing negara pihak yang terlibat.
Wilayah kerja: tempat kedudukan Perwakilan RI beserta wilayah kerja, rangkaian dan organisasi internasional yang dimandatkan secara resmi untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah RI.
Rencana kesepakatan yang akan ditindaklanjuti terdapat pada Dokumen Pemetaan. Dokumen pemetaan adalah rekapitulasi rencana kesepakatan yang akan ditindaklanjuti dan disusun di awal tahun.

Formula:

$$\frac{\text{Jumlah kesepakatan yang ditindaklanjuti/diimplementasikan}}{\text{Jumlah rencana kesepakatan Indonesia dengan wilayah kerja yang akan ditindaklanjuti sesuai dokumen pemetaan rencana kesepakatan}} \times 100\%$$

Tujuan:
Mengukur kesepakatan bilateral Indonesia dengan wilayah kerja KJRI Frankfurt yang ditindaklanjuti

Satuan Pengukuran: Persentase

Tingkat Kendali IKU: () High (X) Moderate () Low

Tingkat Validitas IKU: () Exact (X) Proxy () Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU: Fungsi Politik, Ekonomi, Pensosbud dan Protokol Konsuler

Unit/Pihak Penyedia Data: Fungsi Politik, Ekonomi, Pensosbud dan Protokol Konsuler

Sumber Data: Rekapitulasi dokumen dari tindak lanjut kesepakatan berdasarkan laporan pertemuan/kegiatan, brafaks perwakilan, surat dan/kepada K/L teknis, pernyataan pers, liputan media, pidato pejabat, website *treaty room*

Jenis Cascading IKU: (X) Cascading Peta () Cascading Non peta () Non-Cascading

Metode Cascading: () Direct (X) Indirect

Jenis Konsolidasi Periode: () Sum () Average (X) Take Last Known Value

Jenis Konsolidasi Lokasi: () Sum () Average (X) Raw data

Polarisasi Indikator Kinerja: (X) Maximize () Minimize () Stabilize

Periode Pelaporan: () Bulanan (X) Triwulanan () Semesteran () Tahunan

Tabel Data:

Periode Pelaporan	2019		2020		2021
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	87%	100%	70%	100%	70%
s.d TRIWULAN 1	27%	25%	21%	25%	20%
s.d TRIWULAN 2	57%	50%	43%	45%	40%
s.d TRIWULAN 3	77%	75%	65%	70%	60%
s.d TRIWULAN 4	87%	100%	70%	100%	70%

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA**

81

Perspektif:	Business Process
Sasaran Strategis:	Diplomasi Ekonomi, Sosial dan Budaya KJRI Frankfurt yang Kuat
Deskripsi Sasaran Strategis:	<p>Diplomasi ekonomi adalah diplomasi untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi melalui berbagai kerja sama seperti perdagangan, investasi, energi, perhubungan, pariwisata, pertanian, perikanan, perindustrian, keuangan, perpajakan, kerja sama ekonomi teknik.</p> <p>Wilayah Kerja adalah tempat kedudukan Perwakilan RI beserta wilayah kerja rangkaian dan organisasi internasional yang dimandatkan secara resmi untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah RI.</p> <p>Diplomasi sosial adalah aktivitas diplomasi untuk mencapai tujuan-tujuan sosial melalui berbagai kerja sama seperti pembangunan kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan.</p> <p>Diplomasi budaya adalah aktivitas diplomasi untuk mencapai tujuan-tujuan pelestarian dan pengenalan budaya Indonesia kepada dunia internasional, dengan penggunaan aset budaya nasional untuk mendukung pemenuhan tujuan kebijakan luar negeri Indonesia.</p> <p>Kuat adalah mempunyai kemampuan untuk bersaing dengan negara lain.</p>
Indikator Kinerja Utama:	IKU-1 Jumlah Kesepakatan di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Deskripsi Indikator Kinerja Utama:	<p>Definisi: Kesepakatan adalah hasil kesepakatan pada setiap proses perundingan di bidang ekonomi, sosial dan budaya</p> <p>Ruang lingkup kesepakatan bidang ekonomi mencakup antara lain: perdagangan, investasi, energi, perhubungan, pariwisata, pertanian, perikanan, perindustrian, keuangan, perpajakan, kerja sama ekonomi teknik</p> <p>Ruang lingkup kesepakatan bidang sosial dan budaya mencakup antara lain: kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, olahraga, riset dan teknologi, pertukaran budaya, pelestarian aset-aset budaya, bencana alam, flora dan fauna</p> <p>Batas waktu: Jumlah kesepakatan yang disepakati selama satu periode anggaran.</p> <p>Ruang lingkup: Kesepakatan kerja sama juga termasuk dalam kerangka kerjasama yang dibentuk antara wilayah kerja dengan stakeholders terkait di Indonesia (Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Parlemen, lembaga thinktank, lembaga pendidikan, dan badan usaha).</p> <p>Formula: Jumlah kesepakatan di bidang ekonomi dan sosial budaya yang terealisasi</p> <p>Tujuan: mengukur sejauh mana diplomasi ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan telah dijalankan dengan efektif dan berkualitas</p>
Satuan Pengukuran :	Jumlah
Tingkat Kendali IKU :	<input type="checkbox"/> High <input checked="" type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> Low
Tingkat Validitas IKU :	<input type="checkbox"/> Exact <input checked="" type="checkbox"/> Proxy <input type="checkbox"/> Activity
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU :	Fungsi Ekonomi dan Fungsi Pensosbud
Unit/Pihak Penyedia Data :	Fungsi Ekonomi dan Fungsi Pensosbud
Sumber Data :	Records of Discussion (RoD), Naskah Kesepakatan, Diplomatic Notes, Joint Statement, Declaration, Joint Communiqué, Letter of Intent, Chairman's Note, Memorandum of Understanding, Exchange of Notes, Summary Record, Agreed Minutes, Treaty, Minutes of Meeting, Laporan Perwakilan RI.
Jenis Cascading IKU:	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta <input type="checkbox"/> Cascading Non peta <input type="checkbox"/> Non-Cascading
Metode Cascading :	<input type="checkbox"/> Direct <input checked="" type="checkbox"/> Indirect
Jenis Konsolidasi Periode :	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Take Last Known Value
Jenis Konsolidasi Lokasi :	<input checked="" type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input type="checkbox"/> Raw data
Polarisasi Indikator Kinerja :	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan :	<input type="checkbox"/> Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2019		2020		2021
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	8	5	8	5	5
s.d TRIWULAN I	2	1	2	1	1
s.d TRIWULAN II	4	2	4	2	2
s.d TRIWULAN III	6	3	6	3	3
s.d TRIWULAN IV	8	5	8	5	5

Indikator Kinerja Utama:

Deskripsi Indikator Kinerja Utama:

IKU-2 Indeks Respon Positif terhadap Informasi Data Economic Intelligence/Market Intelligence KJRI Frankfurt
Definisi:
Latar Belakang: Dalam menjalankan diplomasi ekonomi, Perwakilan RI harus mencermati potensi ekonomi yang dimiliki masing-masing negara yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia.
Definisi: Data economic intelligence/market intelligence adalah informasi dan kajian hasil analisis di bidang ekonomi (perdagangan, keuangan, investasi, pariwisata, dan jasa) termasuk informasi petuang produk spesifik yang bersifat strategis bagi pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan diplomasi ekonomi Indonesia terhadap wilayah kerja. Data economic intelligence disusun dan dimutakhirkan secara berkala setiap tahun dari masing-masing wilayah kerja. Contoh: KJRI Frankfurt menyusun tiga data economic intelligence untuk Negara Bagian New South Wales, Negara Bagian Queensland dan Negara Bagian South Australia.
Respon positif adalah Pernyataan yang mengindikasikan Data Economic Intelligence/Market Intelligence yang dihasilkan bermanfaat bagi Kemenlu Pusat. Pernyataan tersebut diperoleh dari penerima manfaat.
Indeks skala 1-5, yaitu: Skala 1: Tidak Bermanfaat Skala 2: Kurang Bermanfaat Skala 3: Cukup Bermanfaat Skala 4: Bermanfaat Skala 5: Sangat Bermanfaat (Disesuaikan dengan Brafaks)
Penilaian dilakukan oleh Kemenlu Pusat.
Data economic intelligence periode observasi tahun sebelumnya disampaikan ke Pusat pada Triwulan I tahun berjalan.
Ruang lingkup data economic intelligence adalah: 1. Gambaran Umum Ekonomi Negara Akreditasi/Wilayah Kerja 2. Kebijakan Ekonomi di Negara Akreditasi/Wilayah Kerja 3. Kiat Mengembangkan Bisnis di Negara Akreditasi/Wilayah Kerja 4. Prospek ekonomi dan bisnis di Negara Akreditasi/Wilayah Kerja yang meliputi: Perdagangan, Perdagangan, Investasi, Pariwisata, Jasa dan Kerja sama Keuangan dan Pembangunan 5. Kontak Informasi Bisnis
FORMAT DATA ECONOMIC INTELLIGENCE PERWAKILAN RI :
I. Kata Pengantar II. Daftar Isi III. Pendahuluan Menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan serta ruang lingkup dari penyusunan Data Economic Intelligence.
IV. Gambaran Umum Ekonomi Negara Akreditasi / Wilayah Kerja - Menjelaskan kondisi umum perekonomian negara akreditasi / wilayah kerja dan faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi aktivitas ekonomi dan iklim bisnis seperti stabilitas politik, keamanan dan budaya, serta dilengkapi dengan data sejumlah indikator ekonomi makro seperti laju pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, laju inflasi, budget/anggaran belanja pemerintah, defisit anggaran, tingkat pengangguran, nilai tukar, dan tingkat suku bunga dalam bentuk chart atau tabel. - Bagi Konsulat dan Konsulat Jenderal yang memiliki informasi spesifik kondisi perekonomian di wilayah kerjanya dapat memberikan masukan untuk melengkapi informasi gambaran umum ekonomi negara akreditasi. - <u>Sebagai bahan rujukan dalam peningkatan kerja sama ekonomi Indonesia dengan negara akreditasi / wilayah kerja, agar dicantumkan</u>
V. Kebijakan Ekonomi di Negara Akreditasi / Wilayah Kerja Menjelaskan kebijakan ekonomi yang diberlakukan di negara akreditasi / wilayah kerja, termasuk regulasi terkait dengan insentif ekonomi dan bisnis di sektor perdagangan (barang dan jasa), investasi, pariwisata, jasa skilled worker dan jasa lainnya; akses pasar (barang dan jasa), regulasi yang bersifat protektif antara lain kebijakan substitusi impor, hambatan tarif dan non tarif, regulasi jasa serta kebijakan perbankan dan kepastian. Bagi Konsulat dan Konsulat Jenderal yang memiliki informasi spesifik kebijakan ekonomi di wilayah kerjanya dapat memberikan masukan untuk melengkapi informasi kebijakan ekonomi yang berlaku di tingkat nasional negara akreditasi.
VI. Kiat Mengembangkan Bisnis di Negara Akreditasi / Wilayah Kerja Menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengembangan bisnis ke negara akreditasi / wilayah kerja, seperti budaya bisnis, <u>reim keuangan/perbankan yang berlaku, sistem pembayaran, prosedur ekspor impor, proses pembukaan kantor perwakilan dagang atau</u>
VII. Prospek Ekonomi dan Bisnis di Negara Akreditasi/Wilayah Kerja VII.1. Perdagangan a. Produk impor dan ekspor utama negara akreditasi, dengan dilengkapi data statistik minimal 3 tahun terakhir dari otoritas setempat. b. Negara importir dan tujuan ekspor utama, dengan dilengkapi data statistik minimal 3 tahun terakhir dari otoritas setempat. c. Peringkat perdagangan Indonesia di negara akreditasi dibandingkan dengan negara pesaing utama, termasuk negara ASEAN selama minimal 3 tahun terakhir. d. Analisis jenis produk perdagangan yang potensial untuk dikembangkan, termasuk kondisi pangsa pasar, harga produk dan negara pesaing/kompetitor, ketentuan sertifikasi/standar kualitas produk yang harus dipenuhi serta kiat/strategi bisnis yang perlu diperhatikan/dilakukan pelaku usaha Indonesia, seperti menjalin kemitraan atau mengikuti promosi, saluran distribusi dan target pasar. VII.2. Investasi a. Sektor investasi terbuka dan tertutup (negative list) di negara akreditasi. b. Negara investor utama di negara akreditasi dan negara tujuan investasi utama, dengan dilengkapi data statistik nilai/proyek investasi minimal 3 tahun terakhir dari otoritas setempat. c. Analisis sektor investasi potensial untuk dikembangkan, baik di negara akreditasi ataupun di Indonesia, investor pesaing/ kompetitor, ketentuan khusus yang berlaku pada sektor investasi potensial, perlindungan terhadap investor dan kemungkinan resiko yang perlu diantisipasi (jika ada), serta kiat menarik pengusaha di negara akreditasi berinvestasi di Indonesia. VII.3. Pariwisata a. Negara asal dan tujuan wisata utama, dengan dilengkapi data statistik dan trend minimal 3 tahun terakhir. b. Karakteristik produk wisata yang diminati dan telah dijual negara pesaing kepada wisatawan dari negara akreditasi, seperti produk wisata alam, budaya, sejarah, religi, kuliner, dan belanja. c. Karakteristik turis yang mendatangi tempat wisata (jika ada). d. Potensi pembukaan jalur penerbangan Indonesia dengan negara akreditasi / wilayah kerja (jika ada). e. Analisis jenis produk wisata potensial untuk dikembangkan, termasuk upaya pengembangan paket wisata bersama, strategi promosi untuk

VII.4 Jasa
 a. Jenis jasa skilled worker utama yang terdapat di pasar tenaga kerja negara akreditasi / wilayah kerja, dengan dilengkapi data statistik dan trend minimal 3 tahun terakhir.
 b. Negara asal skilled worker utama yang terdapat di negara akreditasi / wilayah kerja dengan dilengkapi data statistik dan trend minimal 3 tahun terakhir.
 c. Jenis skilled worker asal Indonesia yang terdapat di negara akreditasi / wilayah kerja dengan dilengkapi data statistik dan trend minimal 3 tahun terakhir.
 d. Analisis peluang kerja sektor skilled worker di negara akreditasi / wilayah kerja yang potensial bagi Indonesia serta skala penghasilannya.

VII.5. Kerja sama Keuangan dan Pembangunan (jika ada)
 a. Bentuk skema pendanaan dan kerja sama pembangunan yang diberikan negara akreditasi / wilayah kerja kepada lembaga/ negara lain dengan dilengkapi data statistik dan trend minimal 3 tahun terakhir.
 b. Lembaga/Negara penerima fasilitas/skema pendanaan pembangunan dari negara akreditasi / wilayah kerja
 c. Potensi pendanaan yang dapat dimanfaatkan Indonesia dan ruang lingkup sektor ekonomi yang dapat dikembangkan untuk memperoleh sumber pendanaan dari negara akreditasi / wilayah kerja.

VIII. Kontak Informasi Bisnis
 Menginformasikan daftar contact person dan alamat pihak-pihak terkait (Instansi Pemerintah, Kadin, Asosiasi Pengusaha, Bank Korresponden) di

Formula:

Hasil Survei Kuesioner

Tujuan:

Untuk mengetahui data economic intelligence yang dihasilkan memiliki manfaat bagi stakeholders.

Satuan Pengukuran : Persentase

Tingkat Kendali IKU : () High (X) Moderate () Low

Tingkat Validitas IKU : () Exact (X) Proxy () Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU : Fungsi Ekonomi

Unit/Pihak Penyedia Data : Fungsi Ekonomi

Sumber Data : Brafaks dari Kemenlu Pusat terkait hasil penilaian

Jenis Cascading IKU: (X) Cascading Peta () Cascading Non peta () Non-Cascading

Metode Cascading : () Direct (X) Indirect

Jenis Konsolidasi Periode : () Sum () Average (X) Take Last Known Value

Jenis Konsolidasi Lokasi : () Sum () Average (X) Raw data

Polarisasi Indikator Kinerja : (X) Maximize () Minimize () Stabilize

Periode Pelaporan : () Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2019		2020		2021
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)
s.d TRIWULAN I					
s.d TRIWULAN II					
s.d TRIWULAN III	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)	
s.d TRIWULAN IV	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA**

B3

Perseptif: Internal Business Process

Sasaran Strategis: Basis Data WNI KJRI Frankfurt yang Akurat

Deskripsi Sasaran Strategis:
Definisi:
 Basis data adalah kumpulan data WNI yg dijamin secara sistematis secara daring dan/atau luring dalam sistem informasi pelayanan dan perlindungan WNI yg dapat diolah untuk menghasilkan informasi.
 WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai WNI.
 Ruang lingkup: WNI dalam hal ini adalah yang berkedudukan di luar negeri.
 Akurat adalah teliti; saksama; cermat; tepat benar.
 Basis data WNI yang akurat berarti terwujudnya kumpulan data WNI yang tepat benar yang dijamin secara sistematis secara daring dan/atau luring dalam sistem informasi pelayanan dan perlindungan WNI yg dapat diolah untuk menghasilkan informasi mengenai WNI di luar negeri.
Latar Belakang:
 Terdapat kebutuhan yang tinggi terhadap data WNI yang akurat di luar negeri untuk mendukung kebijakan "Satu Data Indonesia". Saat ini, data WNI di luar negeri tidak terkoneksi satu sama lain dan tidak terintegrasi dengan sistem data nasional. Data yang terdapat di Kemlu, berbeda dengan data yang terdapat pada KPU, BP2MI, Perbankan, Ditjen Imigrasi maupun Dukcapil. Data yang tidak terintegrasi mengakibatkan data tidak akurat, data ganda dan mempersulit Pemerintah Indonesia dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri yang berkualitas.

Indikator Kinerja Utama: IKU-1 Persentase WNI di negara akreditasi KJRI Frankfurt yang Terdaftar di Portal Peduli WNI

Deskripsi Indikator Kinerja Utama:
Definisi:
 Terdaftar berarti WNI yang datanya tercantum di Portal Peduli WNI dan telah diverifikasi oleh Perwakilan RI di luar negeri
 WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai WNI.
 Persentase jumlah WNI yang terdaftar di Portal Peduli WNI menghitung persentase data WNI yang tercantum dan diverifikasi oleh Perwakilan RI di luar negeri di Portal Peduli WNI dibanding jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) WNI di wilayah kerja Perwakilan RI pada Pemilu 2019.
Latar Belakang:
 Portal Peduli WNI adalah sistem informasi pelayanan dan perlindungan terpadu bagi WNI di luar negeri yang telah diturunkan oleh Presiden RI pada tahun 2018. Untuk mendukung kebijakan "Satu Data Indonesia", Portal Peduli WNI telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kemdagri (SIAK), Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian Kemkumham (SIMKIM), Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri BP2MI (SISKOTKLN) serta sistem pendataan dan pelayanan nasional lainnya.
 Selain mendukung kebijakan "Satu Data Indonesia", jumlah WNI yang terdaftar pada Portal Peduli WNI dapat mempermudah proses pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri dan bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri secara lebih baik dan akurat.
 Data pembanding/pembagi adalah data DPT Pemilu tahun 2019 karena data tersebut dianggap sebagai data yang paling valid dan terbaru dibandingkan data-data lainnya.
Formula:

$$\frac{WPO}{WDPT} \times 100\%$$
 WPO: Jumlah WNI yang tercantum dan diverifikasi di Portal Peduli WNI
 WDPT: Total jumlah WNI pada DPT 2019 x 100%
 Target minimal WPO :
 2020 = 20% jumlah WNI yang diverifikasi datanya di Portal Peduli WNI
 2021 = 50% jumlah WNI yang diverifikasi datanya di Portal Peduli WNI
 2023 = 80% jumlah WNI yang diverifikasi datanya di Portal Peduli WNI
 2024 = 100% jumlah WNI yang diverifikasi datanya di Portal Peduli WNI
 Contoh: DPT Pemilu tahun 2019 di wilayah kerja KJRI Frankfurt adalah 10.000 WNI, maka pada tahun 2020, KJRI Frankfurt paling sedikit harus mendorong lapor diri WNI dan memverifikasi minimal 2.000 WNI pada Portal Peduli WNI. Pada tahun 2021, 5.000 WNI, pada tahun 2023, 8.000 WNI dan pada tahun 2024, 10.000 WNI.
Tujuan:
 Mengukur persentase jumlah WNI yang datanya tercantum dan diverifikasi di Portal Peduli WNI

Satuan Pengukuran : Persentase

Tingkat Kendali IKU : High Moderate Low

Tingkat Validitas IKU : Exact Proxy Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU : Fungsi Konsuler Perwakilan RI

Unit/Pihak Penyedia Data : Fungsi Konsuler Perwakilan RI, Atase Imigrasi, Atase Pendidikan dan Kebudayaan, Atase Ketenagakerjaan dan Atase Perhubungan

Sumber Data : Database Portal Peduli WNI

Jenis Cascading IKU : Cascading Peta Cascading Non peta Non-Cascading

Metode Cascading : Direct Indirect

Jenis Konsolidasi Periode : Sum Average Take Last Known Value

Jenis Konsolidasi Lokasi : Sum Average Raw data

Polarisasi Indikator Kinerja : Maximize Minimize Stabilize

Periode Pelaporan : Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan

Periode Pelaporan	2019		2020		2021
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TANUNAN	N/A	N/A	20%	100%	50%
s.d TRIWULAN I	N/A	N/A	5%	25%	15%
s.d TRIWULAN II	N/A	N/A	10%	50%	25%
s.d TRIWULAN III	N/A	N/A	15%	75%	35%
s.d TRIWULAN IV	N/A	N/A	20%	100%	50%

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA**

L1

Perspektif: Learning and Growth

Sasaran Strategis: Tata Kelola Organisasi KJRI Frankfurt yang Baik

Deskripsi Sasaran Strategis:
Definisi:
Organisasi adalah kesatuan bagian yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.
Tata Kelola merupakan rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarah, pengelolaan, serta pengontrolan suatu organisasi. Tata kelola juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (stakeholders) yang terlibat dalam pengelolaan tujuan organisasi.

Indikator Kinerja Utama: IKU-1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KJRI Frankfurt

Deskripsi Indikator Kinerja Utama:
Definisi:
Nilai evaluasi AKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
 Sesuai dengan Permenpan No.12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP, penilaian evaluasi AKIP meliputi lima komponen dan bobot, yaitu: (1) perencanaan kinerja: 30%; (2) pengukuran kinerja: 25%; (3) pelaporan kinerja: 15%; (4) evaluasi internal: 10%; dan (5) capaian kinerja: 20%.
Klasifikasi Nilai evaluasi AKIP:
 (1) AA (Skor > 90-100); Sangat Memuaskan
 (2) A (Skor > 80-90); Memuaskan
 (3) BB (Skor > 70-80); Sangat Baik
 (4) B (Skor > 60-70); Baik
 (5) CC (>50-60); Cukup
 (6) C (>30-50); Kurang
 (7) D (0-30); Sangat Kurang
Formule:
Tujuan:
 untuk mengukur sejauh mana Perwakilan RI telah melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil.

Satuan Pengukuran : Nilai (kategori)

Tingkat Kendali IKU : () High (X) Moderate () Low

Tingkat Validitas IKU : (X) Exact () Proxy () Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU : Seluruh Fungsi

Unit/Pihak Penyedia Data : Inspektoral Jenderal

Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi AKIP dan Inspektorat Jenderal

Jenis Cascading IKU: (X) Cascading Peta () Cascading Non peta () Non-Cascading

Metode Cascading : () Direct (X) Indirect

Jenis Konsolidasi Periode : () Sum () Average (X) Take Last Known Value

Jenis Konsolidasi Lokasi : () Sum () Average (X) Raw data

Polarisasi Indikator Kinerja : (X) Maximize () Minimize () Stabilize

Periode Pelaporan : () Bulanan () Triwulanan () Semesteran (X) Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2019		2020		2021
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	77 (BB)	76,2 (BB)	78 (BB)	76,74 (BB)	79 (BB)

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA**

L2

Persepektif:	Learning and Growth
Sasaran Strategis:	Sarana dan Prasarana KJRI Frankfurt yang Memadai
Deskripsi Sasaran Strategis:	Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sarana dan prasarana sangat menunjang kinerja Perwakilan RI dan merupakan salah satu prioritas Kemenlu dalam pemenuhannya dengan program tersendiri. Memadai adalah terpenuhi sesuai dengan rencana kebutuhan yang tercantum dalam DIPA.
Indikator Kinerja Utama:	IKU-1 Persentase Sarana dan Prasarana KJRI Frankfurt yang Dipenuhi Sesuai dengan Rencana
Deskripsi Indikator Kinerja Utama:	<p>Definisi: Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Yang dipenuhi sesuai dengan rencana adalah terpenuhi sesuai dengan rencana kebutuhan yang tercantum dalam DIPA. Balasan Waktu: 1 tahun Anggaran</p> <p>Formula:</p> $\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana yang dipenuhi sesuai dengan DIPA}}{\text{Total sarana dan prasarana yang direncanakan dalam dokumen DIPA}} \times 100\%$ <p>Tujuan: untuk mengukur seberapa jauh memadai sarana dan prasarana KJRI Frankfurt dalam mendukung kinerja</p>
Setuan Pengukuran :	Persentase
Tingkat Kendali IKU :	<input type="checkbox"/> High <input checked="" type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> Low
Tingkat Validitas IKU :	<input type="checkbox"/> Exact <input checked="" type="checkbox"/> Proxy <input type="checkbox"/> Activity
Uni/Pihak Penanggung Jawab IKU :	HOC
Uni/Pihak Penyedia Data :	BPKRT
Sumber Data :	Lapran realisasi pemenuhan sarana dan prasarana
Jenis Cascading IKU:	<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta <input type="checkbox"/> Cascading Non peta <input type="checkbox"/> Non-Cascading
Metode Cascading :	<input type="checkbox"/> Direct <input checked="" type="checkbox"/> Indirect
Jenis Konsolidasi Periode :	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Take Last Known Value
Jenis Konsolidasi Lokasi :	<input type="checkbox"/> Sum <input type="checkbox"/> Average <input checked="" type="checkbox"/> Raw data
Polarisasi Indikator Kinerja:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan :	<input type="checkbox"/> Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2019		2020		2021
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	100%	100%	100%	100%	100%
s.d TRIWULAN I	25%	25%	25%	25%	25%
s.d TRIWULAN II	50%	50%	50%	50%	50%
s.d TRIWULAN III	75%	75%	75%	75%	75%

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN LUAR NEGERI**

Perspektif:	Learning and Growth
Sasaran Strategis:	Pengelolaan Anggaran KJRI Frankfurt yang Optimal
Deskripsi Sasaran Strategis:	Pengelolaan Anggaran adalah kegiatan yang diawali dengan penyusunan rencana kerja, penuangannya dalam dokumen pelaksanaan anggaran, pengawasan atas realisasinya, pencatatan dalam sistem akuntansi pemerintah, dan penyusunan Laporan Keuangan. Optimal berarti paling baik dan tertinggi Ruang lingkup: Anggaran yang Optimal dicapai dengan penyerapan anggaran yang maksimal serta terpenuhinya target-target kinerja yang telah ditetapkan
Indikator Kinerja Utama:	IKU-1 Nilai Kinerja Anggaran KJRI Frankfurt
Deskripsi Indikator Kinerja Utama:	<p>Definisi:</p> <p>Penilaian atas kinerja anggaran dilakukan oleh pihak luar di luar Kementerian Luar Negeri yaitu Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran Kementerian Keuangan. Nilai kinerja anggaran terdiri dari dua perhitungan, yaitu nilai evaluasi kinerja anggaran dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran. Bobot untuk variabel tersebut masing-masing sebesar 60% dan 40%.</p> <p>Nilai evaluasi kinerja anggaran tercantum pada aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan. Sementara, nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan nilai indikator kinerja atas pelaksanaan anggaran KL yang tercantum pada sistem informasi Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.</p> <p>Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terdiri dari 4 aspek pelaksanaan anggaran yaitu: Kesesuaian antara Perencanaan dan Pelaksanaan, Kepatuhan terhadap regulasi, Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan, Efisiensi pelaksanaan Kegiatan. Indikator IKPA diantaranya: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pagu Minus, Retur SP2D, Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan, Penyampaian Data Kontrak, Pengelolaan Uang Persediaan, Penyampaian LPJ Bendahara, Dispensasi SPM, Kesalahan SPM, Perencanaan Kas.</p> <p>Sedangkan kriteria pada SMART merupakan pencapaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam tusa kerja berupa keluaran dari kegiatan atau program, dan hasil dari program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur</p> <p>Formule:</p> <p align="center">60% Nilai SMART + 40% Nilai IKPA</p> <p>Tujuan:</p> <p>untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja anggaran KJRI Frankfurt</p>
Satuan Pengukuran :	Nilai
Tingkat Kendali IKU :	() High (X) Moderate (X) Low
Tingkat Validitas IKU :	(X) Exact () Proxy () Activity
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU :	Seluruh Fungsi
Unit/Pihak Penyedia Data :	Kementerian Keuangan
Sumber Data :	Aplikasi SMART Kemenkeu dan Aplikasi SPAN Kemenkeu

Tabel Data :

Periode Pelaporan	2019		2020		2021
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	100	98,6	90	98,3	91
s.d TRIWULAN I	25	23	25	43	40
s.d TRIWULAN II	50	49	50	62	60
s.d TRIWULAN III	75	73	80	83	75
s.d TRIWULAN IV	100	98,6	90	98,3	91